



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bahan Penyusunan LKPJ Bupati Luwu Timur.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020, bertujuan memberikan informasi capaian pelaksanaan kinerja program dan kegiatan pada tahun 2020, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu kami mengharapkan dukungan, masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Malili, 1 Februari 2020

Kepala BKPSDM



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. 1

Nip.19810511 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	3
1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	4
1.4 Data Umum Perangkat Daerah	10
BAB II PERUBAHAN RKPD DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH.....	16
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH.....	21
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	21
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	44
3.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	44
3.4 Kerjasama Daerah	50
3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD T.A Sebelumnya	53
3.6 Penghargaan.....	53
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	55
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	55
4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan	55
4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya	55
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	55
BAB V PENUTUP	57



BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran perubahan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58);

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 ditetapkan visi kepala daerah adalah :

“LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”

Guna mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan **8 misi** yang saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi daerah yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Berbasis Sumber Daya Dan Didukung Oleh Stabilitas Keamanan Wilayah Dan Nilai Nilai Budaya.
2. Mendorong Peningkatan Investasi Daerah.
3. Memanfaatkan Ruang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah Untuk Menjamin Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Mencapai Kualitas Manusia Yang Tinggi
5. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Serta Sarana Dan Prasarana Wilayah Untuk Menunjang Percepatan Pembangunan Daerah
6. Mendorong Reformasi Birokrasi Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
7. Mendorong Berkembangnya Masyarakat Yang Religius Dan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama
8. Meningkatkan Koordinasi Dan Kerja Sama Antar Daerah

Sesuai dengan Visi Misi Bupati Luwu yang telah ditetapkan maka prioritas pembangunan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan **Urusan Penunjang**. BKPSDM dalam mendukung dan pencapaian Visi Bupati Luwu Timur melaksanakan **Misi ke-6** yaitu “**Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik**”.

1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pada Revisi Renstra SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tujuan dan Sasaran BKPSDM

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Data Awal (2015)	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2021
					2016	2017	2018	2019	2020	
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas		Cakupan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	%	66.13	60.23	68.27	67.03	69.45	65.95	70
	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase Pejabat Struktural Daerah	%	78.56	89.15	89.23	91.33	95.08	100	100
		Persentase PNS yang mengikuti Diklat	%	22.81	21.3	46.26	66.66	82.78	87.88	100
		Persentase Pejabat Fungsional	%	97.03	70.25	91	89.59	94.56	92.26	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	Nilai	50	50	50	60	65	68	70

(sumber : Renstra BKPSDM 2016-2021)

1.3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Yaitu "**Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas**"

1.3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Yaitu "**Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi ASN**" yang memiliki **3 Indikator sasaran** sebagai berikut :

1. Persentase Pejabat Struktural Daerah

Jumlah Formasi Jabatan Struktural Daerah lingkup Kab. Luwu Timur pada Tahun 2020 adalah 590 dan telah terisi sebanyak 528.

Adapun data capaian kinerja dapat dilihat gambar berikut :

Gambar 1.1

Persentase Pejabat Struktural Daerah



Jumlah target kinerja pada Tahun 2020 adalah 100 % namun realisasi kinerja hanya mencapai 89,49% dikarenakan adanya kendala sebagai berikut :

- Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.273/487/SJ, terkait Pilkada Serentak bahwa penggantian dan pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional harus dengan persetujuan tertulis KEMENDAGRI (Sementara menunggu Izin MENDAGRI atas usulan penggantian Pejabat Struktural).
- Berdasarkan hasil koordinasi di PUSLATBANG KMP Makassar, bahwa hasil Assessment untuk 3 (tiga) JPT Pratama yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan telah selesai, namun masih menunggu perampungan tanda tangan dari TIM PANSEL.

- Beberapa pejabat struktural yang pensiun baik karena telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), karena meninggal dunia maupun atas permintaan sendiri.
- Beberapa pejabat struktural pindah /mutasi keluar dari Kab. Luwu Timur.
- Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.820/6923/SJ tanggal 23 Desember tentang Larangan Penggantian Pejabat yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020.

Adapun data capaian kinerja sasaran selama 5 Tahun dapat dilihat gambar berikut :

Gambar 1.1.1

Persentase Pejabat Struktural Daerah Tahun 2016 s.d 2020



2. Persentase PNS yang mengikuti Diklat

Jumlah Keseluruhan PNS Kab. Luwu Timur per 31 Desember Tahun 2020 adalah 3.887 orang sementara jumlah keseluruhan PNS yang telah mengikuti Diklat dari Tahun 2016 s.d 2020 adalah 3.439 Orang.

Adapun data capaian kinerja dapat dilihat gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2

Persentase PNS yang mengikuti Diklat

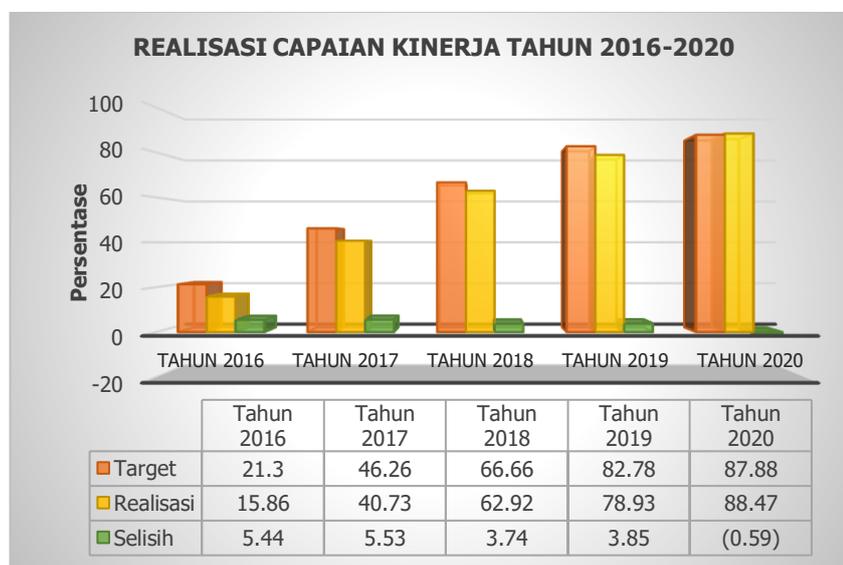


Target Kinerja Tahun 2020 adalah 87,88 % dan realisasi kinerja mencapai 88.47%. Tercapainya target kinerja pada indikator ke 2 (Dua) ini dikarenakan berkurangnya jumlah PNS Kabupaten Luwu Timur per 30 Desember 2020 menjadi 3.887 orang yang pada Bulan awal Januari 2020 mencapai angka 3992 orang.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja sasaran selama 5 Tahun dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.2.1

Persentase PNS yang mengikuti Diklat Tahun 2016 s.d 2020



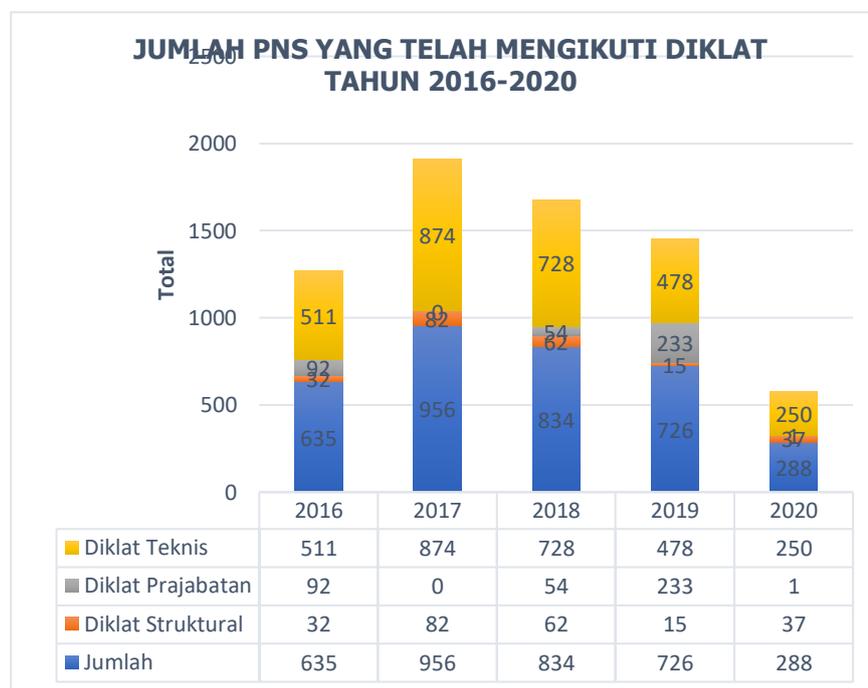
Adapun jenis diklat yang diselenggarakan melalui BKPSDM ada 3 (Tiga) jenis yaitu :

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Adapun realisasi kinerja masing – masing jenis diklat tahun 2016-2020 dapat dilihat gambar 1.2.2 berikut :

Gambar 1.2.2

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Diklat Prajabatan, dan Diklat Struktural Tahun 2016-2020

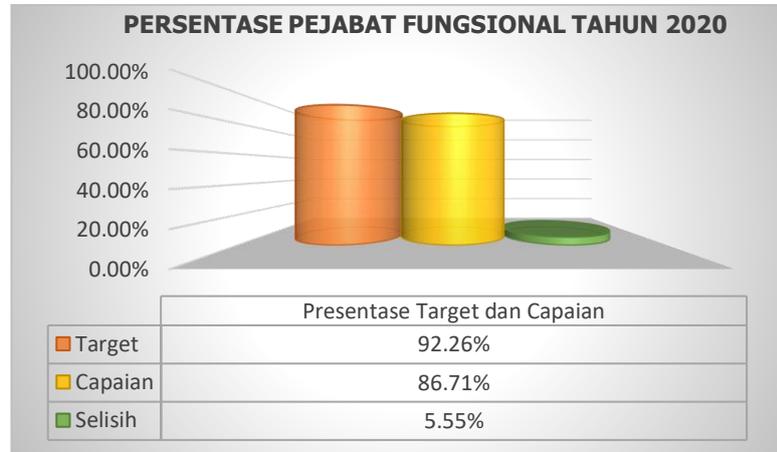


3. Persentase Pejabat Fungsional

Jumlah Jabatan Fungsional lingkup Kab. Luwu Timur yang terisi pada Tahun 2020 sebanyak 3.360 orang dari Target 3.875 orang.

Gambar 1.3

Persentase Pejabat Fungsional Tahun 2020



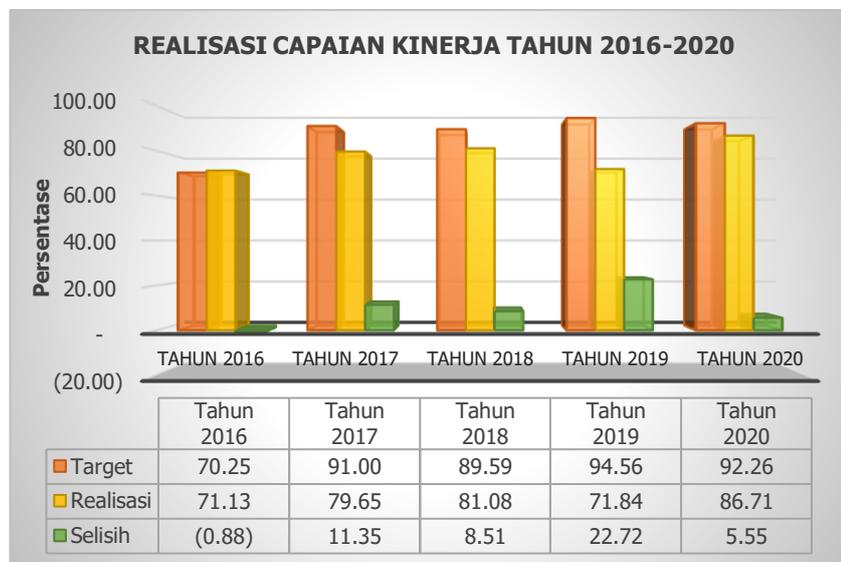
adapun target Kinerja pada Tahun 2020 adalah 92,26 % dan realisasi kinerja hanya mencapai 86,71 % dikarenakan adanya kendala sebagai berikut :

- Adanya wabah COVID-19 sehingga pelaksanaan Tes CPNS Tahun 2020 tertunda begitupun dengan diklat dasar/prajabatan belum dilaksanakan di Tahun 2020 sehingga penempatannya juga belum dapat diproses .
- Beberapa pejabat fungsional yang pensiun baik karena telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), karena meninggal dunia maupun atas permintaan sendiri.
- Beberapa pejabat fungsional pindah /mutasi keluar dari Kab. Luwu Timur.
- Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.820/6923/SJ tanggal 23 Desember tentang Larangan Penggantian Pejabat yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja sasaran selama 5 Tahun dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.3.1

Persentase Pejabat Fungsional Tahun 2016 s.d 2020



1.4 Data Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2016 Tanggal 7 Nopember 2016 pada pasal ayat Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Luwu Timur yaitu :

- a) Tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Kepegawaian daerah, dalam rangka terciptanya aparatur daerah yang profesional, berkualitas serta bermoral tinggi, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
- b) Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur :
 1. Perumusan pelaksanaan Kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan kepegawaian.
 2. Perumusan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan data kepegawaian.

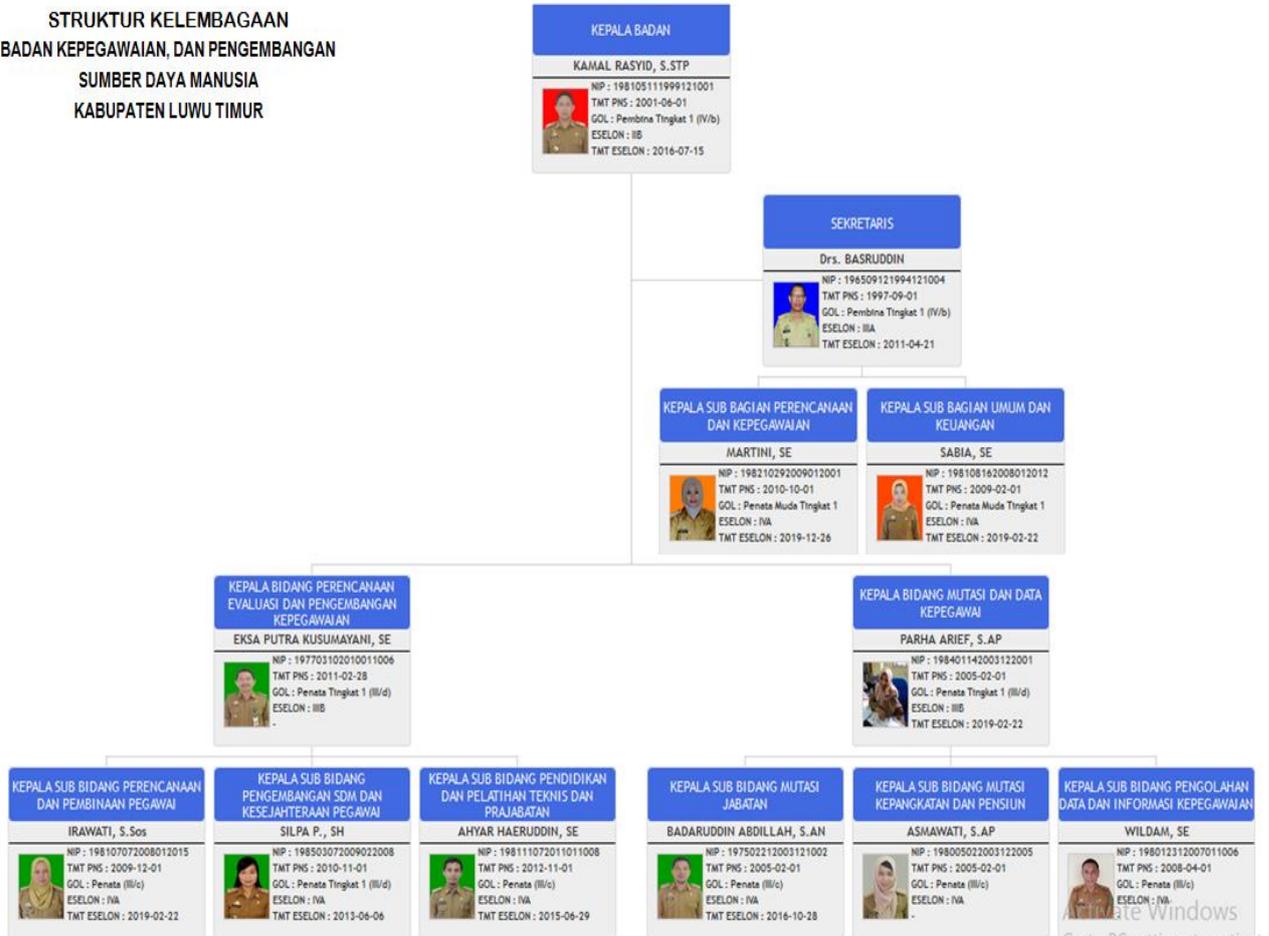
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi.
4. Pelaksanaan administrasi badan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi BKPSDM terdiri atas:

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat Badan
 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawian
 2. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
- C. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Kepegawaian
 1. Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian
 2. Sub. Bidang Pengembangan dan Sumber daya Manusia
 3. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Prajabatan
- D. Bidang Mutasi dan Data Kepegawian
 1. Sub. Bidang Mutasi Jabatan
 2. Sub. Bidang Mutasi Kepangkatan dan Pensiun
 3. Sub. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian

Gambar 1
Struktur Organisasi BKPSDM Kab. Luwu Timur

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



1. Jumlah PNS

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada BKPSDM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SD/ Sederajat				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	IV			2										2	0	2
2	III			6	11									6	11	17
3	II							2	3					2	3	5
4	I													0	0	0
5	CPNSD													0	0	0
	Jumlah PNS & CPNS	0	0	8	11	0	0	2	3	0	0	0	0	10	14	24
6	Honoror/Upah Jasa			2	6	1		6	2	1		1		11	8	19
	Jumlah Upah Jasa	0	0	2	6	1	0	6	2	1	0	1	0	11	8	19
	TOTAL	0	0	10	17	1	0	8	5	1	0	1	0	21	22	43

(sumber : Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian BKPSDM)

Tabel 1.3

Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan
Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada BKPSDM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Pejabat Struktural / Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SD/ Sederajat				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	IIa			1										1	0	1
2	IIb													0	0	0
3	IIIa			1										1	0	1
4	IIIb				1									0	1	1
5	IVa			2	5									2	5	7
6	IVb													0	0	0
	JUMLAH	0	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10

(sumber : Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian BKPSDM)

Tabel 1.4

Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada BKPSDM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Pejabat Fungsional	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total			
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Sederajat		SD/ Sederajat					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Fungsional Tertentu																
	1 Analisis Kepegawaian Pertama	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	JUMLAH	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

(sumber : Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian BKPSDM)

2. Target dan Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak memiliki Target Pendapatan.

3. Target dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Tabel 1.5

Target dan Realisasi Keuangan menurut Jenis Belanja pada Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
 Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3x100%
	BELANJA	9,903,242,200	9,344,985,000	94.36
1	Belanja Tidak Langsung	2,486,456,300	2,321,131,914	93.35
	Belanja Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	2,486,456,300	2,321,131,914	93.35
2	Belanja Langsung	7,416,785,900	7,023,853,086	94.70
	Belanja Pegawai	2,268,000	2,268,000	100.00
	Belanja Barang dan Jasa	7,257,837,900	6,886,573,086	94.88
	Belanja Modal	156,680,000	135,012,000	86.17

(sumber : Sekretariat BKPSDM)

4. Target dan Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak memiliki Target Pembiayaan.



➡ BAB II

BAB II**PERUBAHAN RKPD DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Perubahan RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020

No	URAIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN BELANJA LANGSUNG	JUMLAH ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	RKPD / Renja-PD Pokok	9	35	10,198,821,250	2,608,598,300
2	APBD / DPA Pokok	9	35	11,169,669,950	2,608,598,300
3	PERGESERAN I				
4	PERGESERAN II	9	34	7,466,834,600	2,486,456,300
5	PERGESERAN III*)				
6	RKPD PERUBAHAN/ Renja-PD Perubahan	9	34	7,416,785,900	2,486,456,300
7	APBD PERUBAHAN/ DPPA	9	34	7,416,785,900	2,486,456,300

(sumber : Renja eplanning, DPA Pokok, DPA Pergeseran dan DPPA Tahun 2020)

Pada Renja Pokok terdapat 9 Program, 35 Kegiatan dan Anggaran sebesar Rp. 12.807.419.550,- (Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.608.598.300,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.198.821.250,-). Pada Renja Perubahan terdapat perubahan kegiatan dan anggaran karena adanya efisiensi Belanja Daerah yaitu Jumlah Kegiatan menjadi 34 (Kegiatan Pengembangan SIMPEG dihapus), anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. Rp. 2.486.456.300,- (efisiensi 4,68%) dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.416.785.900,- (efisiensi 27,28 %).

Pada DPA Pokok terdapat 9 Program, 35 Kegiatan dan Anggaran sebesar Rp. 13.778.268.250,- (Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.608.598.300,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.169.669.950,-).

Pada DPA Pergeseran II terdapat perubahan kegiatan dan anggaran karena adanya efisiensi Belanja Daerah yaitu Jumlah Kegiatan menjadi 34, Jumlah anggaran Belanja Tidak Langsung menjadi Rp. Rp. 2.486.456.300,- (efisiensi 4,68% dari DPA Pokok) dan anggaran Belanja Langsung menjadi Rp. 7.466.834.600,- (efisiensi 33,15 % dari DPA Pokok).

Pada DPA Perubahan terdapat perubahan Jumlah anggaran Belanja Langsung menjadi Rp. 7.416.785.900,- (efisiensi 0,67 % dari DPA pergeseran). Jika dilihat dari DPA Pokok ke DPA Perubahan terdapat efisiensi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.752.884.050 (33.59 %).

Seperti yang kita lihat pada tabel 2.1 diatas pada Tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebanyak 33.59 % (khusus belanja langsung) dari DPA Pokok, hal ini memberikan dampak pada kinerja BKPSDM.

Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 yaitu : **(1) Persentase Pejabat Struktural Daerah, (2) Persentase PNS yang mengikuti Diklat dan (3) Persentase Pejabat Fungsional** dari ke 3 target IKU ada 2 (Dua) yang tidak tercapai yaitu "*Persentase Pejabat Struktural Daerah*" dan "*Persentase Pejabat Fungsional*" sebagai dampak dari wabah Covid-19 dan terkendala oleh aturan yang berlaku (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.273/487/SJ, terkait Pilkada Serentak bahwa penggantian dan pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional harus dengan persetujuan tertulis KEMENDAGRI) dan (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.820/6923/SJ tanggal 23 Desember tentang Larangan Penggantian Pejabat yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020).

Adapun dari 9 Program dan 34 Kegiatan BKPSDM Tahun 2020 yang terdampak dari efisiensi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ASN**

Adapun kegiatan dari program ini adalah :

- a) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
- b) Beasiswa Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara
- c) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas ASN dan Fungsi bagi PNS Daerah

d) Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Adapun kegiatan yang terdampak adalah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas ASN dan Fungsi bagi PNS Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah, yaitu usulan beberapa Diklat Teknis dari OPD tidak dapat dilaksanakan begitupun dengan Diklat Struktural yang jumlah pesertanya dikurangi.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Adapun kegiatan yang dari program ini adalah :

1. Seleksi Penerimaan Calon PNS
2. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
3. Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)
4. Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai

Dengan adanya efisiensi anggaran berdampak negatif pada beberapa kegiatan khususnya Seleksi Penerimaan PPPK dimana usulan Penetapan Nomor Induk PPPK tidak dapat diterbitkan.

Sementara pada kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi PNS Kab. Luwu Timur.

3. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

Adapun kegiatan dari program ini adalah :

- a) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- b) Pengelolaan Pensiun dan Administrasi lainnya
- c) Pengembangan Sistem informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG)
- d) Pemuktakhiran Data Dokumentasi Pegawai

Dengan adanya efisiensi anggaran memberikan dampak negative dan positif pada beberapa kegiatan tersebut diatas seperti, dihapusnya kegiatan "Pemuktakhiran Data Dokumentasi Pegawai".

Dengan dihapusnya kegiatan tersebut, bukan berarti pelayanan SIMPEG terhadap PNS Kab. Luwu Timur tidak berjalan, BKPSDM tetap memberikan pelayanan terhadap seluruh PNS yang membutuhkan pelayanan SIMPEG, akan tetapi efek negatifnya adalah tidak adanya system keamanan web (SSH) yang dibayarkan per tahun dan aplikasi yang ada saat ini tidak mengalami perkembangan.

4. Program Peningkatan Layanan Mutasi dan Kepegawaian

Adapun kegiatan dari program ini adalah :

- a) Penempatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- b) Seleksi Jabatan Tinggi Pratama
- c) Penempatan Jabatan Struktural

Secara umum dampak efisiensi anggaran pada ke 3 (Tiga) kegiatan tersebut memberikan efek positif karena beberapa kegiatan yang telah direncanakan tertunda/tidak dapat dilaksanakan disebabkan bukan hanya karena masalah anggaran akan tetapi yang memberikan dampak terbesar adalah terkendala oleh aturan yang berlaku (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.820/6923/SJ tanggal 23 Desember tentang Larangan Penggantian Pejabat yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020) dan juga dampak dari wabah Covid 19 yang mengakibatkan kegiatan tersebut tidak berjalan / tertunda.



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BKPSDM sebagai Fungsi Penujang Pemerintahan yang terdiri dari 2 (Dua) bidang urusan yaitu Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, memiliki 2 (Dua) Sasaran dengan 9 (Sembilan) program pendukung, dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :

Gambar 3.1



Adapun capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pelaksanaan Urusan Penunjang Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut
								Permasalahan	Rekomendasi LKPJ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 Persen	100.53			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Lembar	1829			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	36 Rekening	35	Tagihan Bulan Desember dibayarkan Bulan Januari 2021		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2 Orang	2			
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	44 Unit	40			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 Jenis	31			

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2020

				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	3 Blok	3		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	470 Kotak	470		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 Eksamplar	48		
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	84 Kali	84		
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	17 Orang	17		
				Monitoring dan Evaluasi	4 Dokumen	4		
				Kunjungan Kerja Dalam Daerah	45 Kali	45		
			2	Program Peningkatan Sarana dan	100 Persen	100		

					Prasarana Aparatur				
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit	12 Unit		
					Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Unit	1		
					Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	3		
				3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	100		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1		
				4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Persen	100		
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3 Laporan	3		

				ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
				Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	1		
			5	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	95 Persen	100		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	7 Dokumen	7		
			6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (ASN)	95 Persen	96.93		
				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	1 Orang	1		
				Beasiswa Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara	35 Orang	30	Realisasi Tugas Belajar Tenaga Pendidikan (Guru) yang memenuhi syarat dan diberi SK Tugas Belajar	

							berjumlah 33 orang tetapi 5 orang mengundurkan diri dengan alasan berhalangan karena ingin merawat orang tua yang sakit dan mendampingi anak sehingga total realisasi Tubel Guru 2020 sebanyak 28 orang dan di triwulan IV terealisasi 2 orang Dokter Spesialis		
				Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas ASN Fungsi bagi PNS Daerah	100 Persen	102	Dari target 245 Orang peserta diklat yang di rencanakan terealisasi 250 orang karena menyesuaikan anggaran yang ada (Pada Diklat		

								SIPD dari target 40 orang yang mengikuti Diklat sebanyak 45 orang (menyesuaikan anggaran yang tersedia)		
					Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	100 Persen	100			
				7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	95 Persen	80.73			
					Seleksi Penerimaan Calon PNS	250 Formasi	111	Terkait realisasi kinerja, dari target 250 formasi/orang yang disetujui oleh Kemenpan RB sebanyak 111 formasi dan formasi yang terisi sebanyak 110 formasi karena terdapat 1 formasi yang		

							tidak ada pendaftar		
				Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	80 Persen	67	Total kasus di tahun 2020 yang dilaporkan sebanyak 18 kasus dan total kasus yang tertangani sampai dengan triwulan IV sebanyak 12 kasus		
				Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	200 Formasi	190	dari target 200 formasi yang disetujui oleh Kemenpan RB sebanyak 190 orang yang mengikuti seleksi dan yang lulus seleksi sebanyak 113 orang		
				Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	444 Orang	443	Pengurusan Karis, Karsu dan Karpeg diproses sesuai usulan yang masuk dan untuk pemberian penghargaan Satya Lancana		

							periode 2019/2020 telah diserahkan pada malam ramah tamah Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020 yang berjumlah 443 orang)		
				8	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	90 Persen	112.26		
					Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100 Persen	83	Total usulan KP yang di usulkan dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebanyak 876 orang dari target 1.050 orang (usulan KP periode april 2020 sebanyak 379 orang dan usulan KP periode oktober 2020	

							sebayak 497 orang		
					Pengelolaan Pensiun dan Administrasi ASN Lainnya	50 Orang	76	teralisasi 76 orang dari 50 orang target, pensiun karena Atas Permintaan Sendiri dan Meninggal Dunia tidak dapat di prediksi	
					Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	1 Aplikasi	0	Kegiatan ini dihapus pada anggaran pergeserankarena adanya efisiensi anggaran	
					Pemutakhiran Data Dokumentasi Pegawai	4,229 Orang	4304		
				9	Program Peningkatan Layanan Mutasi dan Kepegawaian	100 Persen	24.67		
					Penempatan dan Pangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	100 Persen	74	Dari total target 384 orang, teralisasi 283 orang ASN yang di tempatkan	

								dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana karena Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ, terkait Pilkada Serentak bahwa Penggantian dan Pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional harus dengan persetujuan tertulis KEMENDAGRI disamping itu oordinasi dan Pengusulan Izin terhambah karena Wabah Covid-19)		
					Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	100 Persen	0	Masih belum ada hasil Seleksi Jabatan Tahun 2019 disebabkan Koordinasi		

								terhambat karena Wabah COVID-19 (berdasarkan hasil koordinasi di PUSLATBANG KMP Makassar, bahwa hasil Assessment untuk 3 (tiga) JPT Pratama yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan telah selesai, sisa menunggu perampungan tanda tangan dari TIM PANSEL		
					Penempatan Jabatan Struktural	100 Persen	0	Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.273/487/SJ, terkait Pilkada Serentak bahwa penggantian dan pemberhentian Pejabat Struktural		

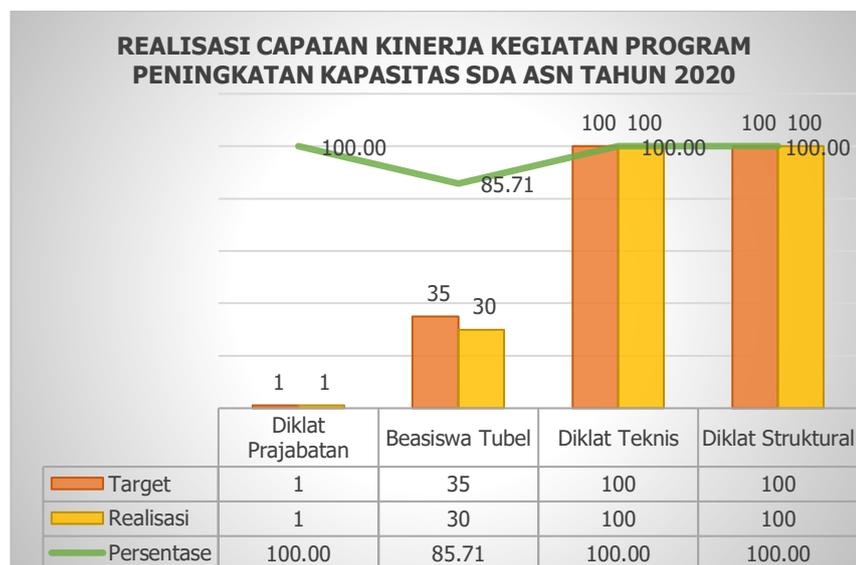
A. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ASN

Indikator Outcome program ini adalah adalah Persentase ASN yang lulus dan meningkat Kapasitasnya dengan pengembangan Kompetensi melalui Diklat. Target Kinerja Program ini 95 % dan Realisasi 96,93%, adapun faktor pendukung tercapainya target program ini adalah terealisasinya target dari 4 (Empat) kegiatan yang mendukung program ini, dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.2

Capaian Kinerja Kegiatan pada Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ASN

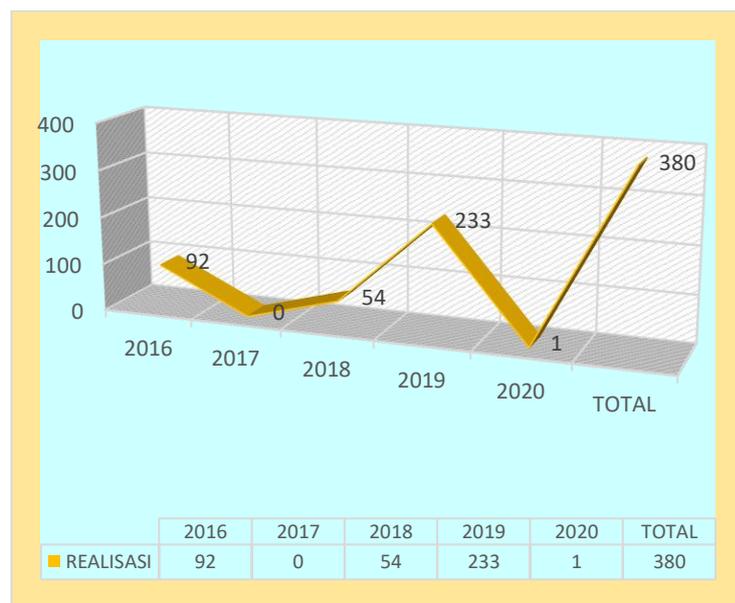


(a) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase ASN yang mengikuti Diklat Dasar. Jumlah Keseluruhan Calon PNS Kab. Luwu Timur Formasi Tahun 2019 adalah 234 dan jumlah yang telah mengikuti Diklat Prajabatan sebanyak 233, sehingga di Tahun 2020 ditargetkan 1 orang (sisa CPNS

yang belum ikut Diklat Prajabatan) dan target tersebut terealisasi 100%. Adapun total jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Dasar Tahun 2016-2020 adalah 380 orang dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut :

Gambar 3.3
Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Diklat Prajabatan
Tahun 2016-2020



(b) *Beasiswa Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara*

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah ASN yang ditugas belajarkan. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Prioritas (KP-1). Dari target 30 untuk Tahun 2020 terealisasi sebanyak 28 orang, sementara KP-1 Umum terealisasi 2 orang Dokter Spesialis.

Jumlah keseluruhan PNS yang telah selesai maupun sementara Tubel dari Tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut :

Gambar 3.4

Realisasi Tugas Belajar Tahun 2016-2020



untuk Guru berprestasi (KP-1 Pendidikan) dari target 100 orang terealisasi 93 orang (93 %). KP-1 Umum terealisasi 34 orang dari target 25 orang (136 %).

Adapun rincian berdasarkan jurusan dan pendanaan dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut :

Gambar 3.5

Realisasi Tugas Belajar Berdasarkan Jurusan dan Pendanaan Tahun 2016-2020

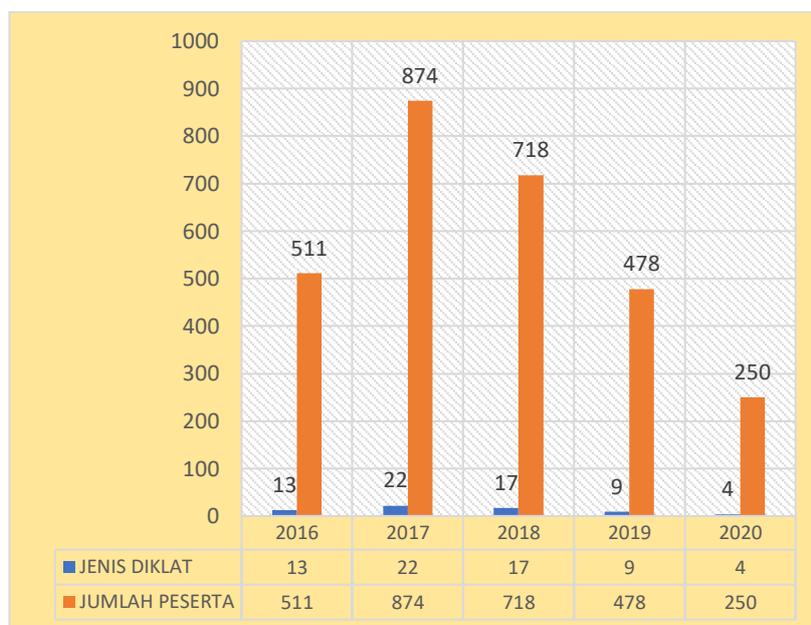


(c) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Indikator Kinerja adalah Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis. Target Tahun 2020 adalah 245 orang dan terealisasi 250 orang 102%). Adapun Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2016-2020 adalah 2.831 orang.

Gambar 3.6

Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Diklat Teknis
Tahun 2016-2020

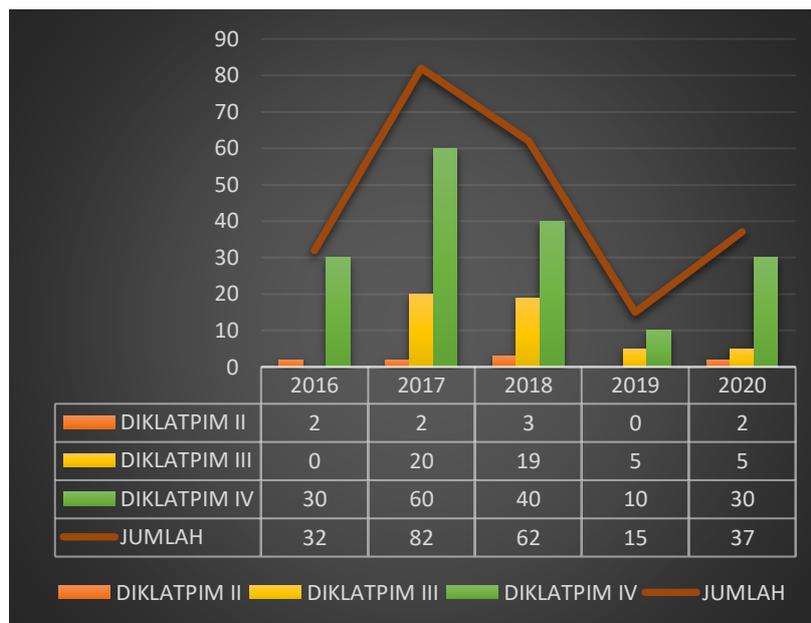


(d) Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase pejabat struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan. Target Tahun 2020 adalah 15 orang dan terealisasi 15 orang 100%). Adapun Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2016-2020 adalah 228 orang dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut :

Gambar 3.7

Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Diklat Struktural
Tahun 2016-2020



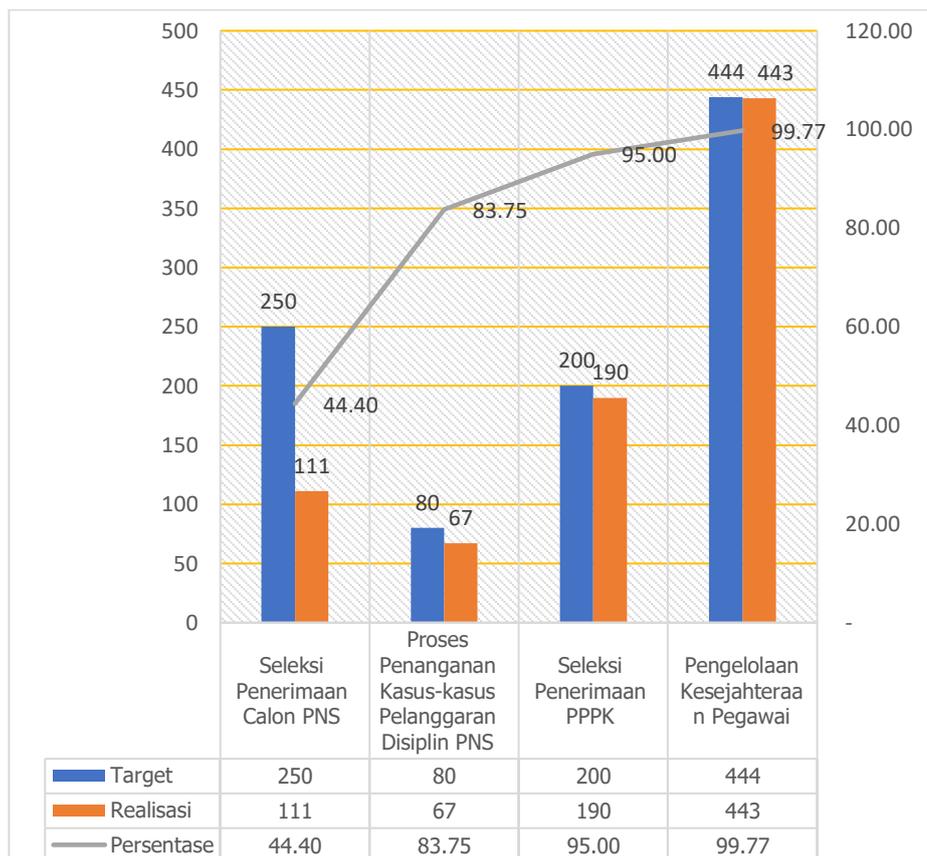
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Indikator Outcome program ini adalah "adalah Persentase ASN yang mendapat jabatan sesuai Analisis Beban Kerja (ABK).

Target Kinerja Program ini 95%, adapun Realisasinya 80,73%. Tidak tercapainya target kinerja program ini terkendala oleh rendahnya realisasi capaian kinerja kegiatan yang mendukung program ini terutama kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS yang realisasi kinerjanya hanya 44.40 % dari target. adapun 4 (Empat) kegiatan yang mendukung program ini, dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut :

Gambar 3.8

Capaian Kinerja Kegiatan pada Program
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



Program ini terdiri atas 4 (Empat) kegiatan dengan masing masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

a) Seleksi Penerimaan Calon PNS

Indikator Kinerja kegiatan ini adalah jumlah Formasi Jabatan yang akan diterima CPNS (Formasi).

Dari 250 formasi yang diusulkan (target) yang disetujui oleh Kemenpan RB hanya 111 formasi (terrealisasi 44.40%).

b) Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase jumlah kasus yang tertangani. Adapun target pada Tahun 2020 adalah 80% dan terealisasi 67 %, dari 18 Kasus yang terlapor hanya 12 kasus yang tertangani.

c) Seleksi Penerimaan PPPK

Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Formasi PPPK yang akan diterima (Formasi). Dari 250 formasi yang diusulkan

(target) yang disetujui oleh Kemenpan RB hanya 190 formasi (realisasi 95%).

d) Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai

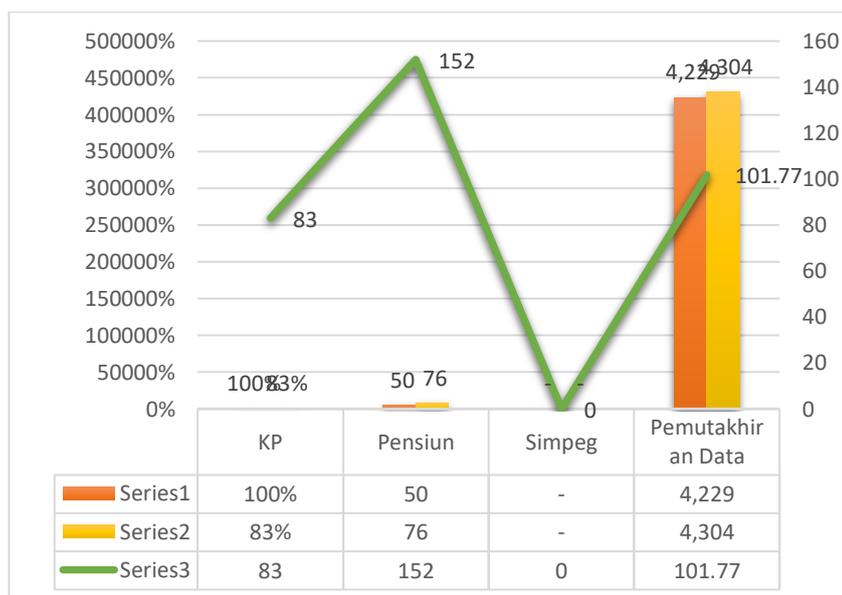
Indikator Kinerja kegiatan adalah Jumlah ASN yang mendapatkan Reward (Orang), adapun target kegiatan ini adalah 444 orang terealisasi 443 orang (99,77 %).

3) Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

Indikator Kinerja Program ini adalah Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat. Target program 90 % dan realisasi 112.26 %. Tercapainya program ini disebabkan oleh tercapainya kinerja kegiatan yang mendukung kegiatan ini.

Gambar 3.9

Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi ASN Tahun 2020



a) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator Kegiatan kegiatan ini adalah Persentase Usulan Kenaikan Pangkat ASN yang ditindaklanjuti, dari target 100 % terealisasi 83%. Total usulan KP yang di usulkan dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebanyak 876 orang

dari target 1.050 orang (usulan KP periode april 2020 sebanyak 379 orang dan usulan KP periode oktober 2020 sebanyak 497 orang).

b) *Pengolaan Pensiun dan Adminsitrasi ASN lainnya*

Indikator kinerja kegiatan ini dalah Persentase Jumlah Usulan Pensiun ASN yang ditindak lanjuti. Target 50 orang terealisasi 76 orang, melampauinya target kinerja kegiatan ini karena pada atahun ini banyak PNS yang Meninggal Dunia di Tahun 2020 yang mana hal ini tidak dapat di prediksi.

c) *Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah*

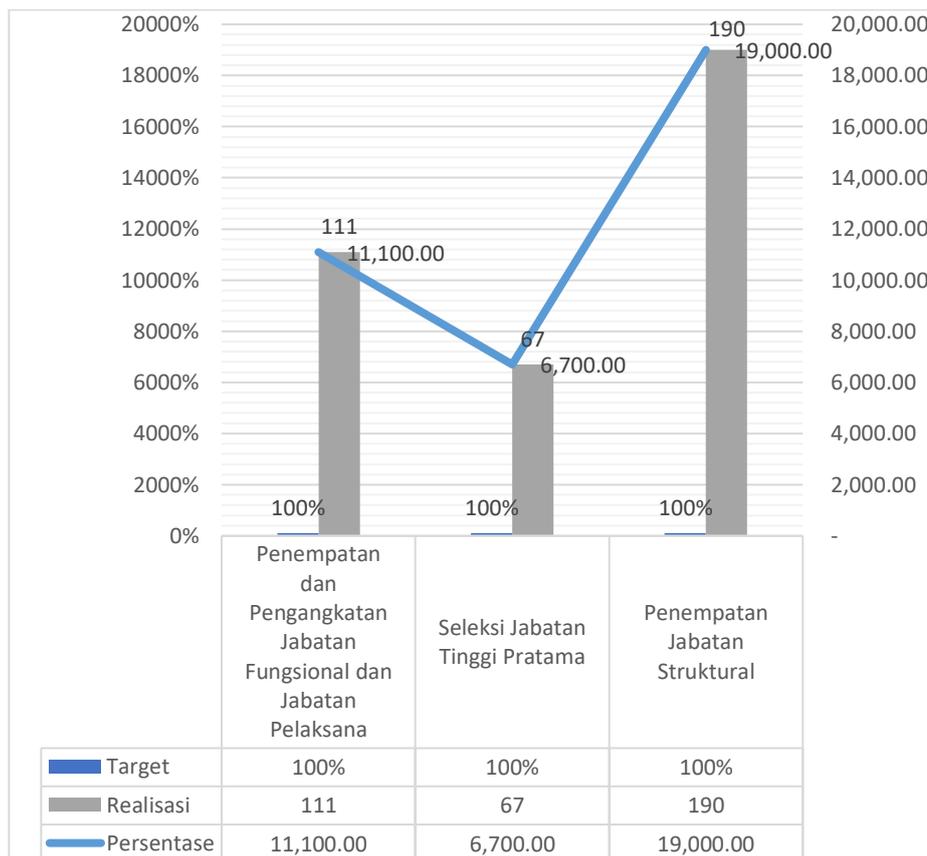
Indikator kinerja kegiatan ini dalah Persentase Jumlah Aplikasi yang dikembangkan (Aplikasi). Dengan adanya efesiensi anggaran Kegiatan ini dihapus.

d) *Pemutakhiran Data dan Dokumentasi Pegawai*

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Data Pegawai yang disusun dan akurat. Target 4.229 realisasi 4.304 (101,77 %).

4) Program peningkatan layanan mutasi dan kepegawaian

Indikator Kinerja Program ini adalah Presentase Jabatan yang terisi, target kinerja program ini adalah 100% dan realisasi sebesar 24.67 %. Rendahnya capaian kinerja program ini adalah dampak dari tidak terlaksananya kegiatan yang mendukung program ini yaitu Seleksi Jabatan Tinggi Pratama dan Penempatan Jabatan Strktural yang disebabkan oleh aturan yang berlaku dan adanya wabah COVID-19. Capaian Program dapat dilihat pada gambar berikut :



a) Penempatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Adapun Indikator Kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase ASN yang ditempatkan dan diangkat dalam jabatan Fungsional dan Pelaksana. Target kinerja 100 % realisasi 74%, rendahnya capaian kinerja pada kegiatan ini disebabkan aturan yang berlaku.

b) Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase ASN yang mengikuti Seleksi Jabatan Tinggi Pratama. Target kinerja 100 % realisasi 0, karena kegiatan terkendala oleh aturan yang berlaku sehingga tidak dapat dilaksanakan.

c) Penempatan Jabatan Struktural

Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Jabatan Struktural yang terisi pada Instansi Pemerintah Daerah

Target kinerja 100 % realisasi 0 karena kegiatan terkendala oleh aturan yang berlaku sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Adapun Jumlah PNS Kab. Luwu Timur per 31 Desember Tahun 2020 adalah 3.887 orang.

Tabel 3.2

Jumlah PNS Kab. Luwu Timur berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin, Eselon dan Pendidikan

No	Berdasarkan	Uraian	Jumlah	Total
1	Golongan	I	9	3,887
		II	495	
		III	2,586	
		IV	797	
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki	1,455	3,887
		Perempuan	2,432	
3	Eselon	II-A	1	528
		II-B	26	
		III-A	46	
		III-B	91	
		IV-A	318	
		IV-B	46	
		Non Eselon	3,359	
4	Pendidikan	SD	10	3,887
		SLTP	13	
		SLTA	443	
		D1-DIII	688	
		S1	2,623	
		S2	109	
		S3	1	

(Sumber : Mutasi dan Data Kepegawaian BKPSDM)

B. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Program Penunjang

- 1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Perencanaan Penganggaran SKPD
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tabel 3.3
Kebijakan Strategis pada Urusan Kepegawaian serta
Pendidikan dan Pelatihan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kenaikan Pangkat Terpadu	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002	Mempercepat Proses Kenaikan Pangkat
2	Penetapan NIP Terpadu	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 23 Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 24 Tahun 2019 Surat Sekretaris Daerah Nomor Tahun 2020	Mempercepat Proses Penetapan NIP CPNS
3	Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah	Penyimpanan Data Kepegawaian yang Akurat
4	Pelaksanaan Diklat Teknis Satu Pintu	Surat Edaran Bupati Luwu Timur nomor 800/405/XI/BKPSDM	Terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan sebagai suatu penerapan manajemen pengelolaan diklat yang lebih terarah, terpadu, efektif, berkelanjutan dan akuntabel
5	Kode Etik	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik	Tertanganinya Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

(Sumber : Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian & Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian BKPSDM)

3.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan BKPSDM Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Realisasi Keuangan pada Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3x100%	(6)	(7)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	927,463,800	861,538,549	93		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,385,000	6,987,000	95		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	45,000,000	30,767,384	68	Anggaran kegiatan ini sifatnya disediakan dan dibayarkan sesuai tagihan yang masuk (Rekening Belanja yang tidak adalah...	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32,780,000	32,145,000	98		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30,000,000	27,725,000	92		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,000,000	30,000,000	100		
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	18,650,000	17,695,000	95		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,480,000	14,480,000	100		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	12,400,000	12,088,000	97		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,520,000	5,060,000	92		

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	488,280,000	441,645,465	90		
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis	222,000,000	222,000,000	100		
	Monitoring dan Evaluasi	8,600,800	8,581,100	100		
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	12,368,000	12,364,600	100		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	208,664,000	185,154,578	89		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156,680,000	135,012,000	86		
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	19,384,000	19,370,000	100		
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32,600,000	30,772,578	94		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,780,000	3,780,000	100		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3,780,000	3,780,000	100		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,213,700	7,113,700	99		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,100,000	5,000,000	98		
	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2,113,700	2,113,700	100		
5	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	7,099,600	7,099,600	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	7,099,600	7,099,600	100		

6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (ASN)	4,765,051,000	4,718,491,600	99		
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	30,055,000	29,570,000	98		
	Beasiswa Tugas Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara	3,034,710,000	3,015,374,000	99		
	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas ASN Fungsi bagi PNS Daerah	1,223,152,000	1,210,500,600	99		
	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	477,134,000	463,047,000	97		
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	930,375,000	728,783,399	78		
	Seleksi Penerimaan Calon PNS	777,996,000	611,669,399	79	Anggaran yang tersisa adalah biaya makan minum kegiatan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Biaya makan minum yang disediakan untuk 5 hari dan pelaksanaan hanya 2 hari, begitu juga dengan perjalanan dinas daerah yang disediakan untuk 7 hari sedangkan yang digunakan hanya 5 hari. perjalanan dinas luar daerah tidak dapat digunakan semua karena penetapan NIP tahun 2020 menggunakan sistem terpadu	

	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	54,660,000	42,080,000	77	Anggaran yang disediakan untuk mengantar tembusan SK penjatuhan Hukuman Disiplin (Netralitas PNS), karena surat keputusan tersebut tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun
	Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	54,340,000	42,465,000	78	Anggaran perjalanan dinas yang disiapkan untuk pengurusan nomor Induk tidak dapat digunakan karena pada akhir triwulan masih dalam proses penginputan dan kelengkapan berkas PPPK
	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	43,379,000	32,569,000	75	Pengurusan Karis, Karsu dan Karpeg diproses sesuai usulan yang masuk
8	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	373,689,000	360,136,260	96	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	202,942,000	201,664,000	99	
	Pengelolaan Pensiun dan Administrasi ASN Lainnya	74,415,000	69,275,000	93	
	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	-	-		
	Pemutakhiran Data Dokumentasi Pegawai	96,332,000	89,197,260	93	
9	Program Peningkatan Layanan Mutasi dan Kepegawaian	193,449,800	151,755,400	78	
	Penempatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	90,557,000	81,541,800	90	

	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	22,644,000	6,900,000	30	Masih belum ada hasil Seleksi Jabatan Tahun 2019 disebabkan Koordinasi terhambat karena Wabah COVID-19 (berdasarkan hasil koordinasi di PUSLATBANG KMP Makassar, bahwa hasil Assessment untuk 3 (tiga) JPT Pratama yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian & Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan telah selesai, sisa menunggu perampungan tanda tangan dari TIM PANSEL).
	Penempatan Jabatan Struktural	80,248,800	63,313,600	79	Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.273/487/SJ, terkait Pilkada Serentak bahwa penggantian dan pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional harus dengan persetujuan tertulis KEMENDAGRI (Sementara menunggu Izin MENDAGRI atas usulan penggantian Pejabat Struktural).
	Jumlah Belanja Langsung	7,416,785,900	7,023,853,086	94.70	

(Sumber : DPPA Tahun 2020, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian & Bidan Mutasi dan Data Kepegawaian)

3.4 Kerjasama Daerah

Adapun Kerjasama yang dilakukan oleh BKPSDM dengan Pihak Ke-3 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Kerjasama Antar Daerah dan Pihak Ketiga Urusan Kepegawaian
serta Pendidikan dan Pelatihan
yang dilaksanakan Sampai dengan Tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur

No	Perangkat Daerah	Instansi Mitra MOU	Tanggal MOU	Nomor MOU	Perihal MOU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Universitas Negeri Makassar (UNM)	29 September 2017	826/24/PEM-LT/IX/2017 4258/UN36/KS/2017	Program Kajian Kebijakan dan Inovasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Sul-Sel	02 April 2018	B-404/BPSDM/890/2018 893.1/02/BKPSDM	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pusat Kajian Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PUSKAPEM-SDM)	25 Juni 2019	893.5/36/VI/BKPSDM/2019 UB-004/PUSKAPEM-SDM/VI/2019	Pelaksanaan Diklat Manajemen Kerumahtanggaan dan Urusan Umum
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Prov.Sul-Sel	17 Juni 2019	893.5/35/VI/BKPSDM/2019 2469/D7.24/KP/2019	Pelaksanaan Diklat Penguatan Kepala Sekolah Pemerintah Kab. Luwu Timur

(Sumber : Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian)

Tabel 3.6

Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Kerjasama Antar Daerah
dan Pihak Ketiga Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan Sampai dengan Tahun 2020
Kabupaten Luwu Timur

No	SKPD	Perihal MoU	Capaian Kinerja	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kajian Kebijakan dan Inovasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur	28 Orang Guru Mahasiswa Tubel	* Jumlah mahasiswa yang dianggarkan sebanyak 93 orang dengan rincian: Tahun 2020 sebanyak 37 orang dan 56 orang mahasiswa lanjutan dari tahun 2015 s.d 2019 * Yang sementara pendidikan berjumlah 56 orang dan tersisa 37 orang khusus di anggarkan di tahun 2020 dengan rincian: 1 orang tenaga umum (Teknis), 1 orang tenaga kesehatan (Dokter spesialis), dan 35 orang tenaga pendidikan (Guru), yang memenuhi syarat dan telah di SK kan sebanyak 33 orang. Akan tetapi 5 orang berhalangan dan mengundurkan diri , sehingga yang terealisasi hanya 28 orang (Guru berprestasi) dan 2 orang Dokter Spesialis	Sisa 7 orang Guru berprestasi yang tetap di targetkan di tahun anggaran 2021

2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2 Orang PKN II dan 35 Orang PKP IV (37 Orang)		
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Diklat Pengelola Perpustakaan Sekolah	40 Orang PNS telah mengikuti Diklat Pengelola Perpustakaan Sekolah		
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Diklat Hipnoterapy	45 Orang PNS telah mengikuti Diklat Hipnoterapy		
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Diklat BTCSL	60 Orang PNS telah mengikuti Diklat BTCSL		
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Bimtek SIPD	45 Orang Kepala sekolah telah mengikuti Bimtek SIPD		

(Sumber : Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian)

3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD T.A Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2020 tidak ada Rekomendasi DPRD untuk BKPSDM

3.6 Penghargaan

Adapun penghargaan yang diterima oleh BKPSDM pada tahun 2020 dapat dilihat

Tabel 3.7

Penghargaan yang Diterima Untuk Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang Diterima Tahun 2020

No	SKPD	Nama Penghargaan	Partisipasi dalam Bidang	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi Pelayanan Terpadu Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS	Mutasi Kepangkatan & Pensiun (Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian)	Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Reegional IV Makassar
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi dalam Pelayanan Terpadu Penyelesaian Penetapan Pertimbangan Teknis Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019	Perencanaan & Pembinaan Pegawai (Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian)	Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Reegional IV Makassar

(Sumber : Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian & Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian)

Gambar 2

Piagam Penghargaan Tahun 2020





 **BAB IV**

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan

Perangkat OPD ini (BKPSDM) tidak ada Tugas Pembantuan

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya

Perangkat OPD ini (BKPSDM) tidak ada Tugas Pembantuan

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Perangkat OPD ini (BKPSDM) tidak ada Tugas Pembantuan



BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 ini adalah LKPJ tahun terakhir masa periode Bupati Luwu Timur terpilih Tahun 2016-2020, sehingga data yang tertuang dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LKPJ Bupati Luwu Timur yang merupakan kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

LKPJ BKPSDM Tahun memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang dilaksanakan oleh BKPSDM selama 1 (Satu) Tahun Anggaran dan juga memberikan informasi data capaian kinerja selama 5 (Lima) Tahun yaitu 2016 -2020 khususnya Urusan Kepegawaian, Pendidikan serta Pelatihan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan saran/masukan maupun kritik dalam proses penyusunan LKPJ Tahun 2020 ini, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada BKPSDM sendiri maupun Kab. Luwu Timur pada umumnya.

Malili, 1 Februari 2020

Kepala BKPSDM



KAMAL RASYID, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP. 19810511199912 1 001